

## ABSTRAK

### **STRATEGI PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS**

Rudy Kasiman, Hipdizah, Joni Widjayanto.<sup>1</sup>

Lima tahun ke belakang sampai dengan saat ini, kita sering mendengar adanya kegiatan-kegiatan ilegal, peredaran narkoba, pencurian sumber daya alam, bahkan pelanggaran perbatasan yang marak terjadi di perbatasan darat negara kita dengan Malaysia. Berdasarkan fenomena tersebut, mendorong peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi sesungguhnya di lapangan serta bagaimana tindakan negara merespon fenomena yang terjadi. Penelitian ini fokus mengidentifikasi potensi ancaman keamanan, dan menganalisis strategi pengamanan yang diterapkan Satgas Pamtas di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia khususnya yang berada di Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh. Penelitian dilakukan dengan melibatkan aparatur sipil, Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten, Kecamatan dan Desa di daerah tersebut serta masyarakat desa setempat. Dengan desain penelitian kualitatif serta beberapa tehnik pengumpulan data diantaranya observasi, analisis dokumen, kuesioner dan wawancara, maka menghasilkan penelitian yang menyimpulkan bahwa potensi ancaman militer adalah pelanggaran wilayah perbatasan yang dilatar belakangi persoalan patok batas dan OBP, sedangkan ancaman non militer yang potensi terjadi adalah berbagai kegiatan ilegal, pencurian sumber daya alam, perdagangan manusia, perdagangan ilegal, penyeludupan sembako dan penyeludupan narkoba, serta dapat dikata strategi pengamanannya belum cukup efektif dan belum optimal karena strategi yang diimplentasikan kurang proporsional, kurang seimbang, dan kurang terkoordinasi dalam *ENDS*, *WAYS* dan *MEANS*, sehingga timbul *RISK* yaitu banyaknya kegiatan ilegal terjadi di perbatasan sehingga menyarankan bahwa untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI, maka perlu kiranya memprioritaskan percepatan penyelesaian masalah OBP dan implementasi strategi pengamanan yang proporsional, seimbang dan terkoordinasi,

**Kata Kunci:** Strategi, Pengamanan, Perbatasan Darat, Ancaman

---

<sup>1</sup> Prodi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

## ABSTRACT

**STRATEGY FOR SAFEGUARDING  
THE INDONESIA-MALAYSIA LAND BORDER AREA  
IN SAMBAS DISTRICT**

*Five years back until now, we often hear of illegal activities, drug trafficking, theft of natural resources, even border violations that are rife at our country's land border with Malaysia. Based on these phenomena, it encourages researchers to find out what actually happened in the field and how the state's actions respond to the phenomena that occur. This research focuses on identifying potential security threats, and analyzing the security strategies implemented by the Sattas Pamantas in the Indonesia-Malaysia land border area, especially those in Sajingan Besar and Paloh Districts. The research was conducted involving civil servants, Forkopimda and other stakeholders in the District, District and Village in the area as well as local village communities. With a qualitative research design and several data collection techniques including observation, document analysis, questionnaires and interviews, it results in research that concludes that potential military threat are the violation of the border area behind the boundary markers issue and OBP, while potential non-military threats occur are various illegal activities, theft of natural resources, illegal trading, human trafficking, food smuggling and drug smuggling, and it can be said that the security strategy is not yet effective enough and is not optimal because the strategy implemented is less proportional, less balanced, and less coordinated in ENDS, WAYS and MEANS, resulting in RISK which is a lot of legal deficiencies occurring at the border, thus suggesting that to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia, it is necessary to prioritize the acceleration of resolving the OBP problem and the implementation of a safeguarding strategy that is proportional, balanced and coordinated, as well as to synergize with other stakeholders in the area*

**Keywords:** Strategy, Security, Land Border, Threats

## PENDAHULUAN

Perbatasan negara merupakan perwujudan kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya kekayaan alam, dan menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Wilayah perbatasan sebagai kawasan terdepan (beranda) dari wilayah negara memiliki peran strategis dalam menjaga integritas teritorial negara. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan pada hukum internasional. Perbatasan negara dengan negara lain dapat berupa perbatasan darat ataupun perbatasan perairan. Perbatasan darat negara Indonesia yang langsung berhubungan dengan negara tetangga adalah perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia-Timor Leste dan Indonesia-Papua New Guinea.

Sebagaimana diketahui, disebutkan “Pulau Kalimantan memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Serawak sepanjang 966 km yang melintasi 14 Kecamatan di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang dan Kabupaten Bengkayang. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 48 km yang melintasi 2 kecamatan dan 1 kabupaten yaitu di Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara dengan Malaysia sepanjang 990 km melintasi 17 kecamatan dan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Nunukan”<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Lampiran Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 Subsubbab 5.3.1. Kawasan Perbatasan Darat, Pasal A. Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia, point Cakupan Administrasi

Kondisi aktivitas lintas batas yang ada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia cukup beragam. Pada kawasan perbatasan ini, kondisi lintas batas dapat dilihat melalui kondisi pertahanan dan keamanan lintas batas, ekonomi lintas batas, sosial budaya lintas batas serta sarana dan prasarana lintas batas. Aspek pertahanan dan keamanan lintas batas ditandai persoalan lintas batas terkait aspek pertahanan dan keamanan yaitu berbagai bentuk ancaman kerawanan tindak pidana karena adanya arus barang, jasa dan orang dari dan ke negara Indonesia-Malaysia secara ilegal. Kondisi pelanggaran ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan pelanggaran/ilegal terkait batas wilayah negara, arus lalu lintas orang dan barang serta indikasi dari perdagangan lintas batas secara ilegal. Kegiatan perdagangan lintas batas dapat dilihat dari beragamnya jenis barang belanjaan dari para pelintas batas (seperti makanan dan minuman kaleng, barang-barang keperluan rumah tangga, barang elektronik hingga pupuk). Indikasi adanya pelanggaran aspek pertahanan dan keamanan lintas batas juga dapat dilihat dengan banyaknya ditemukan jalan-jalan tikus yang sulit dideteksi pada kawasan perbatasan dengan tutupan lahan berupa hutan. Disebutkan bahwa adanya jalan-jalan tikus tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan perlintasan batas ilegal. Umumnya perlintasan batas ilegal ini dilakukan dengan berbagai agenda, namun seringkali berpotensi mengganggu keamanan dan ketahanan NKRI. Kawasan perbatasan ini seringkali dimanfaatkan untuk, jalur penyeludupan narkoba, senjata, dan barang ilegal lainnya. Selain itu terdapat persoalan yang mendukung timbulnya pelanggaran pertahanan dan keamanan yaitu daya tarik negara yang mendorong terjadinya pelanggaran keamanan. Namun demikian beberapa langkah telah dilakukan oleh pihak keamanan dengan mendirikan pos-pos pengamanan perbatasan sepanjang perbatasan meskipun rasio panjang garis batas dan jumlah pos perbatasan belum terpenuhi.

“Secara garis besar terdapat tiga isu pokok dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: penetapan garis batas, pengamanan kawasan perbatasan dan pengembangan kawasan perbatasan”<sup>3</sup>. Dari ketiga isu pokok tersebut, isu keamanan merupakan isu yang paling mengemuka di perbatasan RI-Malaysia. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan keamanan yang timbul berupa berbagai kegiatan kejahatan lintas negara.

Sedangkan menurut sudut pandang pertahanan, beberapa karakteristik kawasan perbatasan Indonesia dapat dikemukakan antara lain: 1. Adanya kegiatan penyeludupan barang dan tenaga kerja Indonesia; 2. Rentannya persoalan yang berkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia; 3. Rendahnya penegakan supremasi hukum, akibat sangat kecilnya tenaga penegak hukum (terutama polisi perbatasan); 4. Derasnya informasi dan komunikasi dari negara tetangga menyebabkan masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga dibandingkan negaranya sendiri.

Memperhatikan timbulnya berbagai gangguan pertahanan dan keamanan di sepanjang perbatasan RI-Malaysia, maka kedua negara sepakat untuk melakukan pengaturan kawasan perbatasan. Pengaturan perbatasan RI-Malaysia didasarkan pada Persetujuan Dasar antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (*Basic Agreement on Border Arrangement between the Republic Indonesia and The Malaysia on Border Agreement*).

Sesuai dengan perkembangan dinamika kedua negara, maka pengaturan wilayah perbatasan ini terus diupayakan secara paralel dengan kepentingan nasional kedua Negara. Kerjasama perbatasan RI-Malaysia dilaksanakan

---

<sup>3</sup> Partnership Policy Paper Nomor 2/2011, Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia, hlm 4.

dengan membentuk forum kelembagaan yaitu Joint Border Committee (JBC), sebuah kerjasama setingkat menteri. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis JBC dilakukan dengan Joint Technical Sub-Committee on Survey, Demarcacy and Mapping (JTSCSM). Kerjasama teknis setingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan melalui Border Liaison Meeting (BLM) yang dilaksanakan setiap tahun sekali baik bertempat di Indonesia maupun Malaysia. Kerjasama perbatasan RI-Malaysia yang ada belum mampu secara optimal mengakomodir kepentingan kedua negara, khususnya bidang pertahanan dan keamanan di perbatasan. Kondisi batas darat antar negara Indonesia-Malaysia meliputi:

- a. Permasalahan Outstanding Boundary Problems (OBP), kasus OBP yang diklaim pihak Indonesia : P. Sebatik, Daerah D 400, G. Jagoi dan Tanjung Datu ( 4 kasus ). Sedangkan yang diklaim pihak Malaysia : P. Sinapad, S. Simantipal , Daerah B 2700 – B 3100, Daerah C 500 – C 600 dan Gunung Raya ( 5 kasus ). Sedangkan kasus Batu Aum diklaim oleh kedua pihak;
- b. Permasalahan survei Investigation, Refixation, Maintenance (IRM) Kegiatan IRM tahun 2009 dapat dilaksanakan walaupun tidak seluruh target volume kegiatan tercapai. Pihak Indonesia masih memiliki kekurangan dibandingkan Malaysia terutama dalam hal: kelengkapan data, ketersediaan dana untuk survei, aksesibilitas ke lokasi, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Indonesia perlu untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, melengkapi data, menyediakan infrastruktur yang lengkap dan baik, serta melakukan diskusi dengan para ahli/pakar dalam maupun luar negeri.
- c. Masalah *Common Border Datum Reference Frame (CBDRF)* dan *Joint Border Mapping (JBM)* Kegiatan *CBDRF* dapat terlaksana sesuai

dengan target *CBDRF*. Namun data yang dimiliki hanya dalam bentuk buku ukur, azimuth dan jarak, yang diperlukan data *Comp Sheet*. Diperlukan dana yang besar dan waktu panjang apabila pengukuran *CBDRF* menggunakan interval pilar batas yang semakin pendek. Sumber data yang berbeda (Malaysia – foto udara dan Indonesia data citra- Terra *SAR*, *IFSAR*) menimbulkan masalah saat penggabungan di garis batas.

Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah paling Barat Kalimantan Barat, di Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Ada lima kabupaten berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisinya tak jauh berbeda. Di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, warga menggunakan garis pantai bagi jalur transportasi sehari-hari. Mereka melewati pantai yang menghubungkan Desa Ceremai dan Desa Temajuk di Kecamatan Paloh. Hanya kendaraan roda dua yang bisa lewat. Butuh keahlian tersendiri. Bila tidak, kendaraan roda dua akan tenggelam di pasir, rantai putus, atau mesin motor jebol karena masuknya air laut. Akibat tak adanya jalan, angkutan jasa dan barang jadi mahal. Ada satu karakteristik khas di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Meski terpisah batas negara, warga sepanjang batas memiliki hubungan erat. Keekerabatan dan hubungan darah membuat hubungan mereka tak pernah terputus. Meski munculnya negara, memisahkan keekerabatan secara geografi karena adanya garis batas negara. Kondisi itu membuat warga di perbatasan, saling tergantung dan membutuhkan. Meski di sisi lain, kebutuhan dan akumulasi kapital, menisbikan hubungan dasar tersebut. Kebutuhan hidup di perbatasan membuat warga harus bersikap realistis dan pragmatis menyikapi keadaan. Ketika mereka bersikukuh dengan tetap memakai uang rupiah atas nama nasionalisme, bisa dipastikan mereka tak akan bisa beradaptasi, dan memenuhi kebutuhan dasar di perbatasan. Apalagi bagi wilayah yang

berhubungan langsung dengan Malaysia. Perbedaan pembangunan ibarat bumi dan langit. Pemerintah Malaysia membangun wilayah perbatasan mereka dengan baik. Pemerintah menyediakan pelayanan publik bagi warganya. Ada pendidikan gratis dan kesehatan bagi warga. Di wilayah Indonesia, pemerintah kurang memperhatikan pembangunan perbatasan. Sekolah tak ada guru, bangunan rusak parah, Puskesmas tak ada petugas dan sulit dijangkau warga. Kondisi itu menciptakan batas sosial dan kecemburuan. Hanya dengan sedikit pemantik, kecemburuan ekonomi dan kesejahteraan yang timpang bakal menciptakan protes dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Karenanya, tak heran bila ketertinggalan secara infrastruktur, pencapaian ekonomi, berimbas pada sikap warga untuk pindah kewarganegaraan atau mengibarkan bendera Malaysia di wilayah Indonesia. Fenomena lainnya, menurut anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Erma Suryani Ranik sebagaimana diberitakan “yang menyindir Malaysia karena banyaknya narkoba dari wilayah jiran itu yang masuk ke Indonesia lewat jalur perbatasan. Termasuk narkoba dari Malaysia yang masuk lewat perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat<sup>4</sup>. Puluhan ribu narkoba dari sana hampir setiap bulan masuk ke Indonesia. Narkoba itu bisa lolos di perbatasan (pos pemeriksaan) Malaysia, tapi bisa tertangkap di perbatasan Indonesia. Narkoba-narkoba itu bisa lolos dari Malaysia dan masuk lewat sejumlah perbatasan yang ada di Kalbar. Seperti di Kabupaten Bengkayang, Sambas, maupun Sanggau. Hampir setiap bulan ada narkoba

---

<sup>4</sup>Erma Suryani Ranik, “...yang menyindir Malaysia karena banyaknya narkoba dari wilayah jiran itu yang masuk ke Indonesia lewat jalur perbatasan. Termasuk narkoba..... Narkoba itu bisa lolos di perbatasan (pos pemeriksaan) Malaysia, tapi bisa tertangkap di perbatasan Indonesia. Narkoba-narkoba itu bisa lolos dari Malaysia dan masuk lewat sejumlah perbatasan yang ada di Kalbar....”, dalam [http://PontianakPost.co.id/nasional/09-2017/Narkoba-narkoba itu lolos dari malaysia/88285.html](http://PontianakPost.co.id/nasional/09-2017/Narkoba-narkoba%20itu%20lolos%20dari%20malaysia/88285.html), 26 September 2017, diakses pada 28 Agustus 2019.

dari Malaysia masuk dan berhasil ditangkap. Itu belum yang tidak tertangkap, aparat berwenang Indonesia di Kalbar sudah sering menggagalkan upaya menyeludupkan narkoba dari Malaysia. Para tersangka dan barang bukti narkoba itu berhasil ditangkap ketika masuk ke perbatasan Indonesia. Ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam persoalan keamanan di perbatasan. Potensi gangguan pertahanan dan keamanan di perbatasan sangat besar mengingat sedikitnya personel yang ditempatkan di wilayah perbatasan, pembangunan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar masih belum optimal. Ini terjadi hampir di semua kabupaten di perbatasan Indonesia-Malaysia yang ada di Kalbar. Khusus Sambas, selain darat juga berbatasan laut dengan Malaysia.

Wilayah perbatasan adalah bagian penting dari RI yang harus menjadi perhatian bersama pemerintah maupun DPR. Sedikitnya personel keamanan yang ditempatkan khusus di wilayah perbatasan sehingga perdagangan orang, masuknya narkoba, penyeludupan dan pencurian ikan di wilayah perbatasan masih tinggi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan juga mengakui bahwa wilayah perbatasan rawan kejahatan seperti narkoba, perdagangan orang, dan lainnya. Hampir semua wilayah perbatasan sumber masuknya narkoba, diperlukan peningkatan patroli di kawasan perbatasan. Peningkatan kesejahteraan petugas negara yang menjaga perbatasan juga harus menjadi perhatian pemerintah. Paradigma dalam mengelola perbatasan harus diubah dengan paradigma baru, wilayah perbatasan harus dilihat sebagai entitas yang memiliki elemen kedaulatan penduduk yang harus dilindungi secara utuh pula. Arah kebijakan pemerintah dalam mengelola perbatasan sudah sesuai dengan nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Serta mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan pembangunan negara tetangga.

Menurut Asops Kasdam XII (2018), Pos Pengamanan Perbatasan yang melaksanakan tugas di sepanjang kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas berjumlah 8 (delapan) Pos, dengan jumlah patok batas yang harus diawasi sebanyak 645 patok. Sedangkan panjang tapal batas Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas membentang dari arah Timur menuju ke arah Barat (Pantai) sepanjang 97km (Menurut Ditjen PDT). Dengan demikian apabila kita bagi secara sederhana daerah tanggung jawab tiap Pos Pamtas menjadi rata-rata ( $97\text{km} : 8\text{pos}$ )  $=12,125 \text{ km/pos}$ , sehingga dengan celah sedemikian lebar maka sangat rawan terhadap berbagai ancaman keamanan berupa tindak penyeludupan, masuknya paham radikalisme dan paham terorisme dengan memanfaatkan celah tersebut. Dan sebagai gelar kewilayahan TNI, Kodam XII/Tanjungpura yang merupakan gelar TNI AD, salah satu tugas yang diemban oleh TNI AD dalam Operasi Militer Selain Perang adalah mengamankan wilayah perbatasan dari kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum, di mana TNI AD menggelar kekuatan operasi pengamanan perbatasan darat yang dilaksanakan oleh Kodam XII/Tanjungpura, dengan menempatkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) pada titik yang dimungkinkan terdapat suatu ancaman dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan.

Informasi pendahuluan yang peneliti terima dari Kodam XII bahwa selama kurun waktu tahun 2015-2019 pengamanan perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI di seluruh perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia mencapai keberhasilan. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan diindikasikan melalui keberhasilan:

- a. Menggagalkan peyelundupan gula.
- b. Menggagalkan peyelundupan TKI ilegal.
- c. Temuan patok batas yang hilang.

- d. Temuan adanya pelanggaran perbatasan yang dibuktikan dengan ditemukannya eskavator dll.
- e. Membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan.
- f. Membantu masyarakat di perbatasan dalam pelayanan pendidikan dan lainnya.
- g. Menggagalkan peyelundupan narkoba.
- h. Mencegah tindakan terorisme dan radikalisme yang masuk melalui perbatasan negara.
- i. Mencegah illegal logging.
- j. Menangkap buronan tindak kriminal lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, terutama karena gelar kekuatan pengamanan perbatasan TNI dihadapkan dengan tugasnya dan potensi gangguan keamanan yang cukup tinggi, serta berbagai pelanggaran lintas batas negara yang sudah terjadi, maka peneliti mengangkat judul dalam penulisan jurnal ini adalah “Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas”.

## **METODELOGI**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi di mana data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori yang dipilih. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan berupa informasi dari narasumber yang diperoleh melalui wawancara atau telaahan dokumen dengan pertimbangan bahwa metode ini dapat menjelaskan fenomena dengan lebih mendalam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan dua orang atau lebih, bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan, namun dalam pelaksanaannya teknik wawancara ini tidak harus dilakukan secara langsung namun dapat juga dilaksanakan melalui sarana yang lain seperti dengan telepon, Surat Elektronik, WA, atau Facebook, dengan responden atau pihak yang dianggap ahli sesuai bidangnya.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Seiring dengan hal tersebut, menurut Sugiyono, “teknik pengumpulan data merupakan cara yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data”. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara-cara memperoleh data sesuai dengan kondisi nyata atau apa adanya melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan mempelajari literatur yang diperlukan sesuai dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari empat jenis yaitu melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi atau gabungan dari ketiganya. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan sumber data sekunder, sedangkan teknik wawancara dan observasi merupakan sumber data primer.

Observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang dengan diniati untuk memperoleh data yang terkontrol validitas dan reliabilitasnya. Semua kegiatan yang sedang berlangsung tidak lepas dari perhatian. Dengan menyaksikan secara langsung suatu kegiatan, maka kita dapat mempercayai peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri, akan menimbulkan kepercayaan suatu kebenaran. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif guna memperoleh informasi melalui interaksi komunikasi atau perbincangan antara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang diwawancarai (*interviewee*). teknik studi dokumentasi, peneliti dapat

memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber semata, melainkan dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang dimiliki informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir. Hal ini sesuai dengan pendapat AH. Nasution yang menyebutkan, bahwa ada pula sumber non manusia (*non human resources*), diantaranya dokumen, foto dan catatan-catatan statistik. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan complement bagi penggunaan metode observasi dan wawancara.

Guna menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data, diperlukan teknik pemeriksaan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pemeriksaan data dari berbagai sumber, cara dan waktu. Pelaksanaan teknik pemeriksaan secara triangulasi ditujukan untuk mendapatkan kepercayaan terhadap data dan informasi yang diperoleh. Triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi juga dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Maksudnya mengumpulkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang esensial dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian meliputi Gambaran Umum Kabupaten Sambas dan Gambaran Umum Pos Pamtas.

Pertama. Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat atau diantara  $0^{\circ}57'29,8^{\circ}$  dan  $2^{\circ}04'53,1^{\circ}$  Lintang Utara serta  $108^{\circ}54'17,0^{\circ}$  dan  $109^{\circ}45'7,56^{\circ}$  Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Sambas, luas Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 4,36 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sambas pada tahun 2018 terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 193 Desa. Penelitian lapangan dilaksanakan di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Data yang dikumpulkan merupakan data pada kurun waktu periode Januari 2015 sampai dengan Agustus 2019.

Perbatasan dengan Malaysia berada di Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh dengan gambaran:

- a. Kecamatan Sajingan Besar terletak di bagian Utara Kabupaten Sambas atau diantara  $1^{\circ}25'$  Lintang Utara serta  $1^{\circ}49'$  Lintang Utara dan  $109^{\circ}25'$  Bujur Barat serta  $109^{\circ}45'$  Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Sajingan Besar adalah: - Utara :Kecamatan Paloh / Serawak (Malaysia) - Selatan : Kecamatan Sejangkung - Barat :KecamatanPaloh/ Kecamatan Galing - Timur : Serawak (Malaysia): Luas Wilayah Luas Kecamatan Sajingan Besar adalah 1.391,20 km<sup>2</sup> atau sekitar 21,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas, merupakan yang terluas di Kabupaten Sambas Kecamatan Sajingan Besar pada tahun 2017 terbagi menjadi 5 Desa. Desa terluas adalah Desa Sei Bening dengan luas 557,30 km<sup>2</sup> atau

40,06 persen sedangkan yang terkecil adalah Desa Senatab dengan luas sebesar 110,04 km<sup>2</sup> atau 7,91 persen dari luas wilayah Kecamatan Sajingan Besar.

Kecamatan Sajingan Besar sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas selain Kecamatan Paloh yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia memiliki peranan yang strategis bagi Pembangunan Kabupaten Sambas seluruhnya. Penataan ekonomi, Pemeliharaan Kamtibmas, Penjagaan Keamanan dan juga pelayanan publik tentunya merupakan hal-hal yang sangat penting bagi manajemen pemerintahan Kecamatan Sajingan Besar. Oleh karena itu Pemerintahan yang solid, struktur yang lengkap dengan penataan wilayah yang efektif merupakan suatu keharusan bagi Kecamatan Sajingan Besar.

Pada tahun 2017 Struktur Perangkat Kecamatan Sajingan Besar sudah cukup lengkap dengan membawahi 5 Desa, 16 Dusun, 19 RW dan 47 RT. Sedangkan Pegawai negeri di kantor Kecamatan Sajingan Besar sebanyak 14 orang terdiri dari laki-laki. 10 orang dan perempuan berjumlah 4 orang.

Berdasarkan angka hasil proyeksi, penduduk Kecamatan Sajingan Besar pada tahun 2017 berjumlah sekitar 11.267 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 8 jiwa per kilometer persegi. Karena itu, persoalan mendesak bagi daerah adalah minimnya sumber daya manusia untuk mengelola pembangunan di daerah yang potensinya amat besar dengan luas wilayah terbesar di Kabupaten Sambas. Penyebaran penduduk di Kecamatan Sajingan Besar tidak merata antar desa yang satu dengan desa lainnya. Desa Sanatab merupakan desa dengan tingkat kepadatan Penduduk tertinggi yaitu 24 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sebaliknya, Sei Bening dengan luas sekitar 40 persen dari total wilayah Kecamatan Sajingan Besar hanya dihuni 2 jiwa/km<sup>2</sup>

- b. Kecamatan Paloh terletak di bagian Utara Kabupaten Sambas atau diantara 1035' Lintang Utara serta 2005' Lintang Utara dan 109038' Bujur Barat serta 109038' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah kecamatan Paloh adalah:
- 1) Utara : Laut Cina Selatan
  - 2) Selatan : Kecamatan Teluk Keramat
  - 3) Barat : Laut Cina Selatan
  - 4) Timur : Serawak (Malaysia)

Desa terluas adalah Desa Sebusus dengan luas 326,21 km<sup>2</sup> atau 28,41 persen sedangkan yang terkecil adalah Desa Matang Danau dengan luas sebesar 44,01 km<sup>2</sup> atau 3,83 persen dari luas wilayah Kecamatan Paloh. Kecamatan Paloh sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas selain Kecamatan Sajingan Besar yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Sambas seluruhnya. Penataan ekonomi, pemeliharaan kamtibmas, penjagaan keamanan dan juga pelayanan publik tentunya merupakan hal-hal yang sangat penting bagi manajemen pemerintahan Kecamatan Paloh.

Oleh karena itu pemerintahan yang solid, struktur yang lengkap dengan penataan wilayah yang efektif merupakan suatu keharusan bagi Kecamatan Paloh. Pada tahun 2017 Struktur Perangkat Kecamatan Paloh sudah cukup lengkap dengan membawahi 8 Desa, 29 Dusun, 59 RW dan 138 RT.

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk. Berdasarkan angka hasil proyeksi, penduduk Kabupaten Sambas di Kecamatan Paloh pada tahun 2017 berjumlah sekitar 25.373 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 22 jiwa per kilometer persegi atau 875 jiwa per dusun. Karena itu, persoalan mendesak bagi daerah adalah minimnya sumber daya manusia untuk mengelola pembangunan di daerah yang potensinya amat besar.

Penyebaran penduduk di Kecamatan Paloh tidak merata antar desa yang satu dengan desa yang lainnya. Desa Matang Danau merupakan Desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 97 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Desa Temajuk dengan luas sekitar 20,03 persen dari total wilayah Kecamatan Paloh hanya di huni 8 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kedua. Pos Pamtas di Kabupaten Sambas disajikan dalam deskripsi data. Satgas Pamtas yang bertugas di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas-Malaysia adalah Satuan Setingkat Kompi (SSK) dengan jumlah personel sebanyak 120 orang, yang merupakan bagian dari Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti, yang berkedudukan di Entikong serta berada di bawah kendali operasi Komando Pelaksana Operasi (Kolakops)

Pamtas Korem 121/Abw di Sintang. Komandan SSK dipimpin oleh seorang Komandan Kompi sekaligus menjadi Komandan Pos Pamtas yang berkedudukan di Aruk yang juga berfungsi sebagai Pos Komando Kompi (Poskoki) yang membawahi dan bertanggung jawab terhadap 8 Pos Pamtas lainnya yang digelar di sepanjang garis perbatasan mulai dari Temajuk sampai dengan KM 28 dengan jumlah keseluruhan 693 patok yang dipertanggungjawabkan.

Pengamanan perbatasan di wilayah Kabupaten Sambas dilaksanakan dengan menggelar pos-pos pengamanan perbatasan dalam rangka mengantisipasi ancaman yang timbul. Ancaman yang memungkinkan terjadi di perbatasan Kabupaten Sambas adalah ancaman pelanggaran wilayah perbatasan di latar belakang permasalahan OBP dan permasalahan patok batas. Selain ancaman pelanggaran batas, di perbatasan Sambas juga terjadi berbagai kegiatan ilegal seperti *illegal logging*, perdagangan manusia, pencurian kekayaan alam dan penyelundupan yang sulit untuk dihentikan sehingga menuntut perhatian serius penanganannya dari Koops Pamtas Kodam XII/Tpr. Ancaman non militer yang memiliki kemampuan sehingga sulit dihentikan yang terjadi di perbatasan Sambas adalah kegiatan *illegal logging*, *human trafficking*, pencurian sumber daya alam dan penyeludupan barang dan narkoba.

Selain permasalahan patok batas, di wilayah perbatasan Sambas yang paling sering ditemukan adalah beberapa kegiatan *illegal logging*, *human trafficking*, pencurian sumber daya alam dan penyeludupan barang dan narkoba. Hal ini didapatkan di semua Pos Pamtas pada saat pemeriksaan terhadap pelintas batas dari dan ke Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan kerawanan adanya ancaman pelanggaran wilayah dan juga kemungkinan adanya usaha kelompok teroris yang akan masuk ke Indonesia. Masih adanya blank spot area di perbatasan Kabupaten Sambas

yang menimbulkan kerawanan adanya ancaman pelanggaran wilayah perbatasan di latar belakang permasalahan OBP dan permasalahan patok batas.

Di wilayah perbatasan Sambas sangat rentan terjadinya berbagai kegiatan ilegal seperti *illegal logging*, perdagangan manusia, pencurian kekayaan alam dan kegiatan penyeludupan, dikarenakan latar belakang panjangnya perbatasan tidak sebanding dengan jumlah pos Pamtas yang sudah digelar sehingga menimbulkan adanya celah-celah dan *blank spot area* sebagai pintu keluar/masuk berbagai kegiatan ilegal dan penyeludupan tersebut. Hal yang mendasar lainnya di wilayah perbatasan Kab.Sambas-Malaysia sampai dengan saat ini adalah kesenjangan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara tetangga, sebagaimana dikatakan Asintel Kasdam XII/Tpr: “kalau mau membangun perbatasan bangun dulu kesejahteraannya, bangun ekonominya, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di kawasan perbatasan, sehingga nantinya berkurang keinginan masyarakat mencari pekerjaan ke Malaysia, berkurang juga kegiatan-kegiatan ilegal Lainnya”<sup>5</sup>.

Wilayah perbatasan Sambas rentan terhadap penyeludupan barang ilegal (sembako, narkoba dan lain-lain) serta masih terjadi kasus human trafficking. Hal tersebut karena banyaknya jalan-jalan tikus yang tidak terdapat pos pengaman perbatasan, selain itu dampak adanya kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan menimbulkan kerawanan terhadap berbagai kegiatan tersebut. Kegiatan ilegal dan penyeludupan dilakukan namun tidak melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN), namun kebanyakan melalui jalan-jalan tikus yang berada di kawasan perbatasan darat yang lolos dari pantauan Pos Pamtas. Hal tersebut dijelaskan Perwakilan Hanggar Bea dan Cukai Aruk. Lebih jauh dijelaskan Perwakilan Hanggar Bea dan Cukai bahwa

---

<sup>5</sup> Transkrip Wawancara dengan Kolonel Inf Wulang Nur Yudhanto pada tanggal 8 Agustus 2019 di Pontianak

pelanggaran kegiatan ilegal semenjak berdirinya PLBN Aruk tidak pernah terjadi, karena pemeriksaan dilakukan secara ketat, adapun pemasukan barang melalui PLBN Aruk oleh masyarakat perbatasan dilakukan dengan KILB (Kartu Identitas Lintas Batas) dengan batasan maksimum 600 Ringgit Malaysia per bulan per orang untuk keperluan sehari-hari.

Tujuan pelaksanaan pengamanan perbatasan di wilayah Kodam XII/Tpr adalah menjaga keamanan perbatasan di lokasi garis batas setempat, dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa. tujuan pelaksanaan pengamanan perbatasan di wilayah Sambas adalah menjaga keamanan perbatasan di lokasi garis batas setempat, mengamankan garis perbatasan tersebut, mencegah bergeser atau hilangnya patok batas, mencegah kegiatan ilegal yang memanfaatkan garis batas yang tidak terawasi sebagai pintu keluar/masuk tidak resmi pelintas batas dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa.

Untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan pembahasan dan penjelasan yang sistematis dan rinci, Oleh karena itu peneliti berusaha mendapatkan data secara faktual dan interpretasi di lapangan tanpa adanya unsur subjektif dari peneliti. Pada subbab ini peneliti mengaitkan hasil kesimpulan dari data temuan selama penelitian berlangsung di lapangan dengan berdasarkan teori-teori yang dipergunakan dalam menganalisis potensi ancaman keamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas serta menganalisis implementasi strategi pengamanannya dalam “menjaga dan

melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa<sup>6</sup>.

## **KESIMPULAN**

Potensi ancaman pada wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas yang merujuk pada evaluasi ancaman pada aspek kemampuan, intensitas dan kerentanan pada pengamanan wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas, maka potensi ancaman militer adalah pelanggaran wilayah perbatasan yang dilatar belakangi persoalan patok batas dan *OBP*. Sedangkan ancaman non militer yang potensi terjadi di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas adalah berbagai kegiatan ilegal, pencurian sumber daya, *human trafficking*, *illegal trading*/penyeludupan sembako dan penyeludupan narkoba. Strategi pengamanan perbatasan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas memiliki tujuan mengamankan garis perbatasan tersebut, mencegah bergeser atau hilangnya patok batas, mencegah kegiatan ilegal yang memanfaatkan garis batas yang tidak terawasi sebagai pintu keluar/masuk tidak resmi pelintas batas, dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan konsep yang dilaksanakan saat ini dengan cara menggelar sembilan pos pamtas yang dilaksanakan oleh satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns sejumlah 120 personel dengan melaksanakan tugas-tugas bidang Intelijen, bidang Operasi, bidang Minlog dan bidang Teritorial, sedangkan sarana dan prasarana yang digunakan adalah pembangunan pos-pos batas

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Pertahanan republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tanggal 27 November 2015 tentang Buku strategi pertahanan negara 2015. Hlm 47

dengan perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pos perbatasan sesuai indeks pos pamtas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi strategi di lapangan dikaitkan dengan teori strategi dan rumusan strategi pertahanan negara, dapat dikata strategi belum cukup efektif dan belum optimal karena strategi yang diimplentasikan kurang proporsional, kurang seimbang, dan kurang terkoordinasi dalam *ends*, *ways* dan *means*, sehingga timbul *risk* yaitu banyaknya kegiatan ilegal terjadi di perbatasan darat Indonesia (Sambas)-Malaysia (Sarawak).

## REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut di atas, untuk dapat mengoptimalkan pengamanan perbatasan di wilayah Kabupaten Sambas maka Peneliti memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

- a. Pemerintah Pusat melalui Menteri Luar Negeri agar mempercepat penyelesaian secara bermartabat atas *Oustanding Boundary Problems (OBP)* yang berada di wilayah Kabupaten Sambas.
- b. Pemerintah khususnya Kemhan dan TNI agar mengevaluasi dan menata ulang pembangunan pos pamtas yang sudah digelar saat ini dihadapkan pada banyaknya jalan pendekat (“jalan tikus”) yang di luar pemantauan pos pamtas untuk mengantisipasi ancaman militer dan ancaman non militer.
- c. Kodam XII/Tpr sebagai Koops dan Korem 121/Abw sebagai Kolakops Pengamanan Perbatasan di wilayah Sambas agar mengevaluasi terkait program-program dalam kegiatan pengamanan perbatasan yang dapat mewujudkan masyarakat perbatasan sebagai “pagar

hidup” dalam menjaga perbatasan dihadapkan panjang wilayah perbatasan dan keterbatasan pos pamtas yang digelar.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Kemhan RI

Partnership Policy Paper No. 2/2011, *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*, Jakarta: The Partnership for Governance Reform.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (cetakan ke-23) Bandung: Alfabeta.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia* Jakarta: Kemhan RI

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 beserta Lampirannya. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Pertahanan republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tanggal 27 November 2015 tentang Buku strategi pertahanan negara 2015.